

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA



RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2017



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah berkat adanya petunjuk dan kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga dapat terselesaikannya Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 ini.

Rencana Kerja SKPD yang dibuat setiap tahun ini merupakan pilar untuk mencapai Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga nantinya dapat terselenggara dengan baik dalam menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 - 2017, dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017.

Secara jujur, kami menyadari Rencana Kerja SKPD ini masih banyak kekurangannya dan kami bertekad akan terus menyempurnakannya di tahun-tahun mendatang.

Demikian kepada semua pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih, semoga Rencana Kerja SKPD ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Amuntai, Pebruari 2016

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,**

**H. MUHAMMAD TAUFIK, S.Sos.MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620522 198503 1 005**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3.. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	34
2.4. Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD	35
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	37
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	37
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	38
3.3. Program dan Kegiatan	42
BAB IV PENUTUP	48
LAMPIRAN	49

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab oleh pemerintah di daerah berlandaskan pada tata pemerintahan yang baik mutlak harus didasarkan atas pemerintahan yang demokratis, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, dengan kewenangan yang diperluas dan dimiliki menuntut kemampuan daerah untuk dapat mengatur pemerintahannya dengan lebih baik, efektif dan efisien. Oleh karenanya manajemen pemerintahan yang dijalankan harus benar-benar dapat mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasannya.

Perencanaan pembangunan yang telah diatur dalam suatu sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Sistem ini memakai tata cara yang dapat mengakomodir semua stakeholder menuju pada satu tujuan bersama. Dengan demikian perencanaan pembangunan diperlukan sebagai panduan (*guide line*) berbagai pihak yang terlibat untuk menyatukan gerak langkah mencapai tujuan.

Perencanaan pembangunan masih memerlukan pembenahan pada tingkat fleksibilitas maupun responsibilitas terhadap lingkungan strategis, baik secara internal maupun eksternal. Hal ini harus dipahami oleh aparat perencana, agar produk perencanaan dapat mengakomodatir terhadap kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat. Untuk mewujudkan perencanaan dimaksud, dalam implementasi diperlukan pendanaan, sumberdaya manusia dan sarana/peralatan yang memadai, serta diperlukan perangkat sistem yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Salah satu dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh SKPD adalah Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam prosesnya penyusunan Renja SKPD ini, mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Renja SKPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD, yang dilakukan melalui :
 - a. Pengolahan data dan informasi.
 - b. Analisis gambaran pelayanan SKPD.
 - c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD.
 - d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
 - e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD.
 - f. Perumusan tujuan dan sasaran.
 - g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.
 - h. Perumusan kegiatan prioritas.
 - i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD.
 - j. Penyesuaian dokumen Rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Pemerintah dan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/x6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 – 2025 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2032 ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang RPJM Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 ;
16. Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 298 Tahun 2013 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 – 2017 ;
17. Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 – 2017.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 ditetapkan dengan maksud :

1. Untuk mengintegrasikan program-program pembangunan bidang Kepegawaian dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 – 2017.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.

Sedangkan tujuan Penyusunan Renja SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 adalah untuk :

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 – 2017.
2. Sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2017.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Pengukuran Kinerja

PENGUKURAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN : HULU SUNGAI UTARA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010, PP No 46 Tahun 2011 dan PP No. 18 Tahun 2011	1000 PNS	-	0 %
Peningkatan Sumberdaya Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pejabat Struktural eselon II, III dan IV yang mengikuti Diklat Pimpinan	24 orang	36 orang	150 %
	Jumlah CPNSD Gol. I, II dan III formasi Umum dan Kategore II yang diikutsertakan Diklat Prajabatan	122 orang	164 orang	115 %
	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional, Kursus, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi	150 orang	265 orang	140 %
	Jumlah PNSD yang mengikuti Ujian Dinas/ Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	40 orang	19 orang	48 %

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Tertatanya PNS berdasarkan kompetensi dan syarat jabatan	Jumlah Formasi dan Jabatan yang terisi sesuai dengan Kompetensi Aparatur	700 orang	298 orang	40 %
	Jumlah Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional	5 kali pelantikan	1 kali pelantikan	20 %
	Jumlah Pelaksanaan Pengambilan Sumpah dan Janji PNS	1 kali penyempahan PNS	-	0 %
Terselenggaranya Penerimaan CPNSD	Jumlah formasi yang terisi	300 Formasi	0	0 %
Terwujudnya pengembangan jaringan SAPK yang berbasis NCSIS secara online	Prosentasi pengembangan jaringan SAPK yang berbasis NCSIS secara online / Pengelolaan database PNS dan entry data PNS	100 % (5346 data PNS)	90,6 % (5.089 PNS)	90,6 %
Meningkatnya disiplin pegawai sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah pelaksanaan Monitoring disiplin PNS dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	10 Kali	3 kali monitoring 16 perkara selesai	100 %
Peningkatan kualitas SDM Aparatur	Jumlah PNS Tubel dan Purna Praja yang mengikuti pendidikan yang mendapatkan Bantuan/Beasiswa	7 orang	3 orang	35 %
	Terjaringnya Alumni SMU/MA menjadi Capra IPDN	5 orang	-	-
Peningkatan kesejahteraan PNSD	Jumlah PNSD yang naik pangkat	700 orang	777 orang	110 %
Tersusunnya DUK PNS	Jumlah Buku Data PNS Kab. HSU Tahun 2014 berdasarkan urutan kepangkatan	70 buku	-	-
Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Terkelolanya administrasi surat-menyurat/ Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	3500 surat	4561 surat	130 %

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya sarana dan prasarana kerja	Persentasi Tersedianya Komunikasi, Langganan Listrik dan air	100 %	100 %	100 %
	Jumlah Alat kebersihan kantor	18 paket	18 paket	100 %
	Jumlah peralatan kerja yang dapat digunakan dengan baik guna kelancaran tugas pelayanan kepegawaian	93 unit	93 unit	100 %
	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia guna kelancaran administrasi perkantoran	44 paket	44 paket	100 %
	Persentasi Terpenuhinya penerangan kantor dan diklat dan alat listrik lainnya	100 %	100 %	100 %
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia guna kelancaran tugas pelayanan kepegawaian yang maksimal	122 buah	122 buah	100 %
	Terpenuhinya Penyediaan makanan dan minuman rapat karyawan BKD	15 kali rapat rutin dan rapat koordinasi	5 kali rapat rutin dan rapat koordinasi	33,5 %
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kepegawaian	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dan Persentasi Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	200 kali (100 %)	241 kali (120,5 %)	120,5 %
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Bangunan/gedung kantor dan diklat yang terpelihara	2 Bangunan gedung	2 Bangunan gedung	100%
	Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 dan kendaraan dinas roda 2 yang siap pakai untuk kelancaran pelaksanaan tugas	2 unit mobil dan 15 unit sepeda motor	2 unit mobil dan 15 unit sepeda motor	100 %
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kepegawaian	Jumlah PNS tidak cakap jasmani/rohani yang Terfasilitasi untuk proses pensiun	8 orang	-	0 %

Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi	Jumlah dokumen LAKIP BKD Kab. HSU Tahun 2014	10 buku	10 buku	100 %
	Jumlah Laporan Keuangan BKD Tahun Anggaran 2014	10 buku	10 buku	100 %

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 : Rp. 5.221.501.500,-
 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015 : Rp. 3.234.177.107,-

Dilihat dari hasil tabel indikator kinerja, kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2015 secara umum menunjukkan hasil yang relatif telah mencapai keberhasilan sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2015. Namun demikian harus diakui masih terdapat sebagian target sasaran yang realisasinya belum dapat dicapai.

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (PP No. 53 Tahun 2010) ke kecamatan - Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (PP No. 53 Tahun 2010) di Pendopo Diklat (1 kali kegiatan) 	Terlaksananya Implementasi Peraturan Perundang-undangan (PP No.50 Tahun 2010) secara komprehensif dan berkesinambungan	67 Orang	134 orang	800 orang	200 orang	1712 orang	-	1500 orang		
2	Jumlah CPNS yang lulus Diklat Prajabatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan CPNS yang belum Diklat Prajabatan - Menginput data CPNS golongan III, II dan I yang belum mengikuti Diklat Prajabatan - Pengiriman peserta Diklat Prajabatan Golongan III ke Bandiklatda Propinsi Kal-Sel - Pelaksanaan Diklat Prajabatan Golongan I dan II di Kabupaten Hulu Sungai Utara 	Terpenuhinya persyaratan CPNS yang lulus diklat Prajabatan	300 orang	300 orang	350 orang	250 orang	- orang	164 orang	250 orang	250 orang	

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Jumlah Pejabat yang lulus Diklat Struktural	- Mengirim Pejabat Struktural mengikuti Diklatpim	Terpenuhinya Persyaratan bagi Pejabat Eselon II dan III	59 orang	64 orang	65 orang	13 orang	10 orang	33 orang	24 orang	24 orang	
		- Pemanggilan Peserta/Pejabat Struktural mengikuti Diklatpim	Terpenuhinya Persyaratan Kompetensi bagi Pejabat Eselon IV	59 orang	64 orang	65 orang	13 orang	-	33 orang	24 orang	24 orang	
		- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim		59 orang	64 orang	64 orang	13 orang	10 orang	33 orang	24 orang	24 orang	
4	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis/Bimtek	- Pemanggilan peserta Diklat Teknis/Bimtek	Terciptanya Sumberdaya Aparatur yang Profesional	200 orang	160 orang	165 orang	180 orang	130 orang	265 orang	120 orang	120 orang	
5	Jumlah PNS yang lulus Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	- Pengiriman peserta Diklat Teknis/Bimtek - Membuat edaran kepada masing-masing SKPD supaya mengusulkan PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian dinas Tingkat I dan II - Pengiriman PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian dinas Tingkat I dan II - Pengiriman PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Terpenuhinya persyaratan untuk Peningkatan Kualifikasi Kepegawaian	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	13 orang	19 orang	40 orang	40 orang	

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Jumlah PNS yang mutasi dan Promosi Terisinya Formasi Pegawai dan Jabatan sesuai dengan kompetensi aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan bahan untuk Rapat Baperjakat - Pelaksanaan Rapat Baperjakat - Penyampaian Draft untuk ditandatangani oleh Bupati - Konsep SK Mutasi - SK Mutasi - Pelaksanaan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan 	Terisinya Formasi sesuai Kebutuhan	700 orang	700 orang	700 orang	700 orang	163 orang	298 orang	725 orang	725 orang	
7	Jumlah CPNS yang diterima	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan kembali jumlah personil PNS dilingkungan Pemkab. HSU Sungai Utara - Melakukan analisis kebutuhan formasi CPNS yang tepat sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja - Menyampaikan Data PNS dilingkungan Pemkab. HSU dan Permintaan Formasi CPNS ke Menpan RB 	Terpenuhinya Formasi Pegawai pada SKPD yang dapat melayani keperluan masyarakat	300 Formasi	300 Formasi	300 Formasi	300 Formasi	68 Formasi	-	250 Formasi	250 Formasi	

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Pemberdayaan database Kepegawaian Daerah / Pengembangan Jaringan SAPK yang berbasis NCSIS secara online	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya database kepegawaian yang akuntabel, cepat dan tepat - Tersedianya informasi Kepegawaian bagi seluruh PNS di Kabupaten Hulu Sungai Utara 	Tersedianya sistem NCSIS secara online dapat melakukan perubahan status kepegawaian dengan cepat dan tepat untuk di akses	5513 PNS	5225 PNS	5225 PNS	5346 PNS	5278 PNS	5087 PNS	5400 PNS		
				100 %	100 %	100 %	100 %	98 %	90,6 %	100 %	100 %	
9	Meningkatnya Disiplin Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemkab. HSU	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penjatuhan hukuman disiplin - Jumlah SKPD yang menyampaikan tembusan laporan penindakan pelanggaran disiplin tingkat ringan dan sedang 	Terbina dan berkembangnya aparatur sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas	15 kasus	10 kasus	10 kasus	11 kasus	5 kasus	16 kasus	10 kasus	10 kasus	
				5	5	10		5		10	10	
10	Jumlah PNS yang Tugas Belajar dan Purna Praja yang mengikuti Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengirim PNS untuk Tugas Belajar - Pemberian Bantuan beasiswa / tunjangan pendidikan 	Tersedianya Sumberdaya Aparatur yang siap pakai	15 orang	15 orang	15 orang	7 orang	6 orang	3 orang	7 orang	7 orang	

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Jumlah yang diterima menjadi Capra IPDN	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumuman Penerimaan Capra IPDN - Menghimpun berkas pendaftaran Capra IPDN - Pengiriman berkas pendaftaran Capra IPDN - Mendampingi Capra IPDN mengikuti Tes/Seleksi 	Tersedianya Kader-kader Pimpinan pada Pemerintahan Daerah	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	-	-	5 orang	5 orang	
12	Jumlah PNS yang naik pangkat / SK Kenaikan Pangkat Terbit	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumuman kepada masing-masing SKPD PNSD yang akan naik pangkat - Menerima, meneliti dan menghimpun berkas PNSD - Rapat Koordinasi kenaikan pangkat PNSD - Mengumumkan PNSD yang telah naik pangkat dapat mengambil SK Kenaikan Pangkat - Penyerahan SK Kenaikan Pangkat 	Jumlah PNS yang yang naik pangkat	700 orang	700 orang	1000 orang	1000 orang	1050 orang	777 orang	1000 orang	1000 Orang	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Capaian Renstra SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur.

Pencapaian Target Kinerja Sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010, PP No 46 Tahun 2011 dan PP No. 18 Tahun 2011	1000 PNS	0	0

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa :

Tingkat Capaian Indikator Kinerja **Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010, PP No 46 Tahun 2011 dan PP No. 18 Tahun 2011**, pada Tahun 2015 target tidak terpenuhi. Karena pada tahun 2014 telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi ke UPT Dinas Pendidikan pada beberapa Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam pelaksanaannya kegiatan sosialisasi dibagi menjadi 22 kali di Sembilan kecamatan yang dihadiri oleh Kepala UPT, Kepala Sekolah dan Seluruh Dewan Guru diwilayah UPT Kecamatan tersebut hanya UPT yang ada di wilayah Kecamatan Paminggir yang masih belum. Pada tahun 2015 kami memfasilitasi pelaksanaan Sosialisasi kecuali adanya undangan / permintaan dari SKPD.

Sasaran 2 : Meningkatnya Sumberdaya Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelatihan

Pencapaian Target Kinerja Sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah PNS yang mengikuti/ lulus Diklat Struktural Eselon II, III dan IV dan Terpenuhi Persyaratan Pendidikan Formal dalam jabatan, persyaratan pangkat dan per syarat kompetensi pendidikan penjurangan	24 org	12 org	50
Jumlah CPNSD Gol. I,II dan III Kategore II dan Formasi Umum yang diikutsertakan Diklat Prajabatan	122 org	164 org	115
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional, Kursus, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi	150 org	265 org	140
Jumlah PNSD yang mengikuti Ujian Dinas / UKPPI (Meningkatnya Kualifikasi Kepegawaian)	40 org	19 org	48

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa :

Tingkat Capaian Indikator Kinerja **Jumlah PNS yang mengikuti/ lulus Diklat Struktural Eselon II, III dan IV dan Terpenuhi Persyaratan Pendidikan Formal dalam jabatan, persyaratan pangkat dan persyaratan kompetensi pendidikan penjurangan**, Tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, telah melakukan kegiatan Pengiriman Pejabat Struktural Eselon II untuk mengikuti Diklat Pim Tk.II sebanyak - orang, Pejabat Struktural Eselon III untuk mengikuti Diklat Pim Tk.III sebanyak 7 orang, Pejabat Struktural Eselon IV untuk mengikuti Diklat Pim Tk.IV sebanyak 5 orang, jadi jumlah seluruhnya 12 orang atau 50 % dibandingkan dengan Tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, telah melakukan kegiatan Pengiriman Pejabat Struktural Eselon II untuk mengikuti Diklat Pim Tk.II sebanyak - orang, Pejabat Struktural Eselon III untuk mengikuti Diklat Pim Tk.III sebanyak 5 orang, Pejabat Struktural Eselon IV untuk mengikuti Diklat Pim Tk.IV sebanyak 5 orang, jadi jumlah seluruhnya 10 orang atau 34 %. Untuk tahun yang akan datang kami akan mendata kembali para pejabat struktural yang masih belum Diklatpim atau yang memenuhi persyaratan.

Dengan kegiatan tersebut nantinya, diharapkan dapat Meningkatkan Pengetahuan dan kemampuan PNS yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas.

Tingkat Capaian Indikator Kinerja **Jumlah CPNSD Gol. I. II dan III Kategore II dan Formasi Umum yang diikutsertakan Diklat Prajabatan** dengan capaian 120 orang dari yang ditargetkan sebanyak 122 orang dengan rincian sebagai berikut :

- A. Formasi Umum = 44 orang
- B. Kategore II Gol. I dan II = 39 orang
- C. Kategore II Gol. III = 37 orang

Jumlah = 120 orang

Tingkat Capaian Indikator Kinerja **Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional, Kursus, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi** dengan capaian 265 orang dari yang ditargetkan 150 orang atau 140 %.

Target sasaran tercapai melebihi dari yang ditargetkan dikarenakan banyaknya minat dari karyawan/karyawati untuk menambah pengetahuan dari Bimbingan Teknis/Diklat Teknis dan Fungsional tersebut demi menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di SKPD masing-masing. Dibandingkan dengan tahun 2014 lalu target sasaran ini tidak tercapai 100 % dikarenakan padatnya kegiatan di Provinsi .

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Diklat dan Ujian Sertifikasi Barang Jasa 1 Angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 40 org
2. Bimbingan Teknis Analisis Jabatan 1 Angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 43 org
3. Bimbingan Teknis Sasaran Kerja Pegawai 1 Angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 61 orang
4. Bimbingan Teknis SIMDA Keuangan 1 Angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 51 org
5. Bimbingan Teknis SIMDA Barang 1 Angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 70 org

Tingkat Capaian Indikator Kinerja **Jumlah PNSD yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah**

Dengan capaian, Ujian Dinas Tingkat I dan II sebanyak 12 orang dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebanyak 7 org jumlah 19 orang atau 48 %. Dibandingkan tahun 2014 Ujian Dinas Tingkat I dan II sebanyak 7 orang dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebanyak 6 org jumlah 13 orang atau 30,7 %. target sasaran ini tidak mencapai 100 % dikarenakan para PNS yang diusulkan masih ada yang belum memenuhi persyaratan atau tidak Lulus. Untuk tahun 2016 nanti kami akan melakukan pendataan kembali PNS yang akan diusulkan mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

Diharapkan PNS yang memenuhi persyaratan, Lulus dan mendapat Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas Tingkat I maupun Tingkat II yang menjadi persyaratan untuk kenaikan pangkat ke III/a dan IV/a dan Sertifikat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah untuk Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

Sasaran 3 :

Tertatanya PNS berdasarkan Kompetensi dan syarat jabatan

Pencapaian Target Kinerja Sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Formasi Pegawai dan jabatan yang terisi sesuai dengan Kompetensi Aparatur	700	198	28

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa :

Tingkat Capaian Indikator Kinerja **Jumlah Formasi Pegawai dan jabatan yang terisi sesuai dengan Kompetensi Aparatur** dengan capaian Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS sebanyak 198 orang (28%). Selama Tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, telah melakukan kegiatan Pemberian Pertimbangan dalam proses Mutasi PNS, Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS, Penempatan PNS, dan pelaksanaan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural. Kegiatan tersebut hasil dari Pertimbangan Tim Baperjakat Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka diharapkan dapat memberikan penyegaran dalam pelaksanaan tugas dan promosi PNS untuk peningkatan kinerja.

Sasaran 4 :

Terselenggaranya Penerimaan CPNSD

Pencapaian Target Kinerja Sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentasi Jumlah CPNS hasil seleksi dengan kebutuhan formasi	100 % (300 Formasi)	-	-

Tingkat Capaian Indikator Kinerja **Prosentasi Jumlah CPNS hasil seleksi dengan kebutuhan formasi**, sasaran ini tidak tercapai dikarenakan pada tahun 2015 Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak mendapat jatah formasi. Berdasarkan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor : B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30-06-2015, tentang Penundaan Penambahan Pegawai ASN Tahun 2015. Bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pegawai Negeri Sipil yang ada sudah mencukupi, hanya saja perlu pemerataan tempat penugasannya. Dibandingkan dengan Tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, telah melaksanakan kegiatan Seleksi Penerimaan CPNSD Formasi Umum. Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNSD dari tanggal 25 Agustus sampai dengan tanggal 07 September 2014 dengan cara online, dan Pelaksanaan Test dengan Sistem CAT pada tanggal 26 Oktober sampai dengan tanggal 06 Nopember 2014 bertempat di SMKN 1 Amuntai, SMKN 2 Amuntai, SMKN 3 Amuntai dan SMAN 2 Amuntai dengan bantuan tenaga operator Tim UKG online dari LPMP Provinsi Kalimantan Selatan dan operator dari ke empat Sekolah tersebut diatas, yang hasilnya dapat langsung dilihat dilokasi Test atau melalui Situs BKN. Dengan rincian : untuk pelamar yang menyampaikan berkas lamaran berjumlah 2879 orang, yang lulus Verifikasi 2721 berkas lamaran Dan yang berhasil lulus test untuk formasi umum tersebut berjumlah 68 orang dari formasi yang tersedia sebanyak 69 dan 1 formasi tidak ada pelamar.

Sasaran 5 :

Terwujudnya pengembangan jaringan SAPK yang berbasis NCSIS secara online

Pencapaian Target Kinerja Sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Kualitas Pelayanan Publik	5346 PNS	5089 PNS	90,6
Prosentasi PNSD yang sudah memiliki KPE	100 %	100 %	100
Prosentasi Penggunaan WEB BKD Kab. HSU	100 %	90,6 %	00

Pada Tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, telah melakukan kegiatan Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah/Pengembangan jaringan SAPK/SIK yang berbasis NCSIS secara online. Sehingga tersedianya data base Kepegawaian yang akurat, cepat dan tepat.

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa Tingkat Capaian Indikator Kinerja **Kualitas Pelayanan Publik** dengan capaian 5089 PNS (90,6%) hal ini dikarenakan adanya PNS yang meninggal dunia, pindah keluar Kabupaten Hulu Sungai Utara dan juga ada yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) atau Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS).

Tingkat Capaian Indikator Kinerja **Prosentasi PNSD yang sudah memiliki KPE** dengan capaian 100 %. Pada Tahun 2014 Kartu Pegawai Elektronik yang telah disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara berjumlah 5177 buah dan telah disampaikan kepada PNS yang bersangkutan.

Tingkat Capaian Indikator Kinerja **Prosentasi Penggunaan WEB BKD Kab. HSU** Ditargetkan Data PNS / Informasi Kepegawaian bagi seluruh PNS Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dapat diakses sebanyak 5346 PNS / 100 %, ternyata yang terealisasi 5089 PNS / 90,6 %. Hal tersebut dikarenakan adanya PNS yang meninggal dunia, pindah keluar Kabupaten Hulu Sungai Utara dan juga ada yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) atau Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS). Data PNS tersebut merupakan data yang terintegrasi dengan e-pupns sehingga keakuratan jumlah datanya lebih dapat dipertanggung jawabkan.

Sasaran 6 :

Meningkatnya disiplin pegawai sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas

Pencapaian Target Kinerja Sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah pelaksanaan Monitoring disiplin PNS dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	10 Kasus	3 kali monitoring 16 Kasus selesai	180

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa :

Tingkat Capaian Indikator Kinerja **Jumlah pelaksanaan Monitoring disiplin PNS dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS** dengan target capaian 3 kali monitoring untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS target 10 kasus dan yang terealisasi 16 kasus (180%) sedangkan pada tahun 2014 target 10 kasus dan realisasi 5 kasus (50 %), hal ini berarti kesadaran Disiplin PNS di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang. Pada Tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, telah melakukan kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran Disiplin PNS. Dan juga melakukan Kegiatan Monitoring / Inspeksi mendadak (Sidak) PNS setiap 3 (tiga) bulan sekali (per triwulan) ke SKPD serta pada saat Apel Gabungan hari Senin dihalaman Kantor Bupati Hulu Sungai Utara. Hasil dari kegiatan Monitoring / Inspeksi mendadak (Sidak) PNS tersebut adalah : “ Masih terdapat PNS yang melanggar ketentuan disiplin PNS dengan tidak hadir tanpa keterangan (alasan yang sah)”.

Sasaran 7 :	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur
--------------------	------------------------------------

Pencapaian Target Kinerja Sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah PNS Tugas belajar dan Purna Praja yang mengikuti pendidikan	7 orang	3 orang	40
Jumlah alumni SMA/MA menjadi Capra IPDN	5 orang	-	0

Selama Tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, telah melakukan kegiatan Pemberian bantuan beasiswa / tunjangan pendidikan bagi PNS yang mengikuti pendidikan dengan status Tugas Belajar dan Praja yang mengikuti pendidikan pada IPDN Bandung utusan Tugas Belajar Pemkab. Hulu Sungai Utara target sebanyak 7 orang. Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa, tingkat Capaian Indikator Kinerja **Jumlah PNS Tugas Belajar dan Purna Praja yang mengikuti Pendidikan**

target 7 orang, dengan capaian 3 orang / 40 % dibandingkan dengan Tahun 2014 target sebanyak 7 orang dan realisasinya 6 orang / 90 %.

Diharapkan dari kegiatan dimaksud dapat Membantu biaya Tugas Belajar PNS yang bersangkutan sehingga nantinya tersedia sumberdaya aparatur yang siap pakai pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, telah melakukan kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN. Setelah melalui tahap seleksi yaitu : Psikologi, Kesehatan, Kesemaptaan dan Akademis, ternyata tidak ada yang lulus menjadi Capra IPDN. Sehingga Indikator Kinerja **Jumlah Alumni SMA/MA menjadi Capra IPDN** tidak tercapai.

Sasaran 8 :	Meningkatnya kesejahteraan PNSD
--------------------	---------------------------------

Pencapaian Target Kinerja Sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah PNSD yang naik pangkat	700 orang	777 orang	110

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa :

Selama Tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, telah melakukan kegiatan Proses Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Periode 01 April dan 01 Oktober 2015. Tingkat Capaian Indikator Kinerja **Jumlah PNS yang naik Pangkat** dengan capaian 777 PNS 110%. Dibandingkan tahun 2014 yang lalu **PNS yang naik Pangkat** dengan capaian 1050 PNS 150%.

Sasaran 9 :	Tersusunnya DUK PNS
--------------------	---------------------

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Buku Data DUK PNS Kab. HSU	70 Buku	-	-

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa :

Target sasaran Tersusunnya DUK PNS dengan Indikator **Jumlah Buku Data DUK PNS Kab. HSU**, tidak tercapai dikarenakan pada akhir Desember 2015 baru menyampaikan Surat Edaran Permintaan Data DUK ke SKPD/Kantor Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

sehingga sampai saat ini masih dalam proses pengumpulan datanya. Hal ini menyebabkan kami tidak dapat membuat/menyusun Buku Data DUK PNS tersebut karena datanya masih kurang. Tahun 2016 kami akan melaksanakan pembuatan Buku Data DUK PNS Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sasaran 10 :

Terlaksananya Administrasi Perkantoran

Pencapaian Target Kinerja Sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terkelolanya administrasi jasa surat-menyurat	3500 surat	4561 surat	130

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa :

Tingkat Capaian Indikator Kinerja **Terkelolanya administrasi jasa surat -menyurat** dengan capaian 4561 surat (130 %).

Sasaran 11 :

Meningkatnya sarana dan prasarana kerja

Pencapaian Target Kinerja Sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentasi Tersedianya Komunikasi, Langganan Listrik dan air	100 %	100 %	100
Jumlah Alat kebersihan kantor	18 paket	18 paket	100
Jumlah peralatan kerja yang dapat digunakan dengan baik guna kelancaran tugas pelayanan kepegawaian	93 unit	93 unit	100
Jumlah alat tulis kantor yang tersedia guna kelancaran administrasi perkantoran	44 paket	44 paket	100
Persentasi Terpenuhinya penerangan kantor dan diklat dan alat listrik lainnya	100 %	100 %	100
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia guna kelancaran tugas pelayanan kepegawaian yang maksimal	122 buah	122 buah	100
Terpenuhinya Penyediaan makanan dan minuman rapat karyawan BKD	15 kali rapat rutin dan rapat koordinasi	5 kali rapat rutin dan rapat koordinasi	33,5

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa :

Tingkat Capaian Indikator Kinerja **Persentasi Tersedianya Komunikasi, Langganan Listrik dan air** dengan capaian 100 %, **Jumlah alat kebersihan kantor** dengan capaian 18 paket, **Jumlah peralatan kerja yang yang dapat digunakan dengan baik guna kelancaran tugas pelayanan kepegawaian** dengan capaian 93 unit, **Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia** dengan capaian 44 paket, **Persentasi Tersedianya penerangan kantor dan Diklat dan alat listrik lainnya** dengan capaian 100 %, **Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia** dengan capaian 122 buah, **Terpenuhinya Penyediaan makanan dan minuman rapat karyawan BKD** dengan capaian 5 kali rapat rutin dan rapat koordinasi 33,5 %,

Sasaran 12 :	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kepegawaian
---------------------	--

Pencapaian Target Kinerja Sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dan Persentasi Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	200 kali 100 %	241 kali 120,5 %	120,5

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa :

Tingkat Capaian Indikator Kinerja **Persentasi Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah** dengan capaian 120,5 %. Hal ini dikarenakan seringnya konsultasi dan koordinasi keluar daerah untuk tindak lanjut pelaksanaan tugas dan untuk menyamakan persepsi yang akan menjadi dasar dalam mengambil keputusan.

Sasaran 13 :	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
---------------------	--

Pencapaian Target Kinerja Sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Bangunan/gedung kantor dan diklat yang terpelihara	2 Bangunan Gedung	2 Bangunan Gedung	100
Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 dan kendaraan dinas roda 2 yang siap pakai untuk kelancaran pelaksanaan tugas	2 unit mobil dan 15 unit sepeda motor	2 unit mobil dan 15 unit sepeda motor	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa :

Tingkat Capaian Indikator Kinerja **Jumlah Bangunan/gedung kantor dan diklat yang terpelihara** dengan capaian 100 %. **Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 dan kendaraan dinas roda 2 yang siap pakai untuk kelancaran pelaksanaan tugas** dengan capaian 100 %

Sasaran 14 :

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kepegawaian

Pencapaian Target Kinerja Sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah PNS yang tidak cakap jasmani/rohani yang terfasilitasi pemeriksaan kesehatan untuk proses pensiun	8 orang	-	-

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa :

Tingkat Capaian Indikator Kinerja **Jumlah PNS yang tidak cakap jasmani/rohani yang terfasilitasi pemeriksaan kesehatan untuk proses pensiun** Tidak tercapai karena tidak adanya PNS yang memohon untuk difasilitasi pemeriksaan kesehatan. Meskipun telah kami usahakan dengan cara mensosialisasikan program tersebut. Dan juga dikarenakan PNS yang mengajukan selama ini telah memenuhi syarat untuk pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS).

Sasaran 15 :

Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi

Pencapaian Target Kinerja Sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Keberadaan dokumen LAKIP	10 Buku	10 Buku	100
Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, LKPJ dan LPPD	10 Buku	10 Buku	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa :

Tingkat Capaian Indikator Kinerja **Keberadaan dokumen LAKIP** dengan capaian 10 Buku / 100 %, **Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, LKPJ dan LPPD** dengan capaian 10 Buku / 100 %.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh gambaran sebagai berikut :

Tahun	2013	2104	2015	2016	2017
Capaian Program	.. %	.. %	.. %	.. %	.. %
Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90	100	100		
Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS	-	-	-		
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	100		
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100	80	90		
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	80	89	90		
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	100	47	20		

PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi dalam Program dan Kegiatan BKD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 antara lain sebagai berikut :

1. Terlambatnya persetujuan kenaikan pangkat yang mengakibatkan terlambat keluarnya SK pangkat.
2. Faktor-faktor Penghambat dalam Penanganan Disiplin PNS :
 - Ketegasan Pejabat berwenang dalam membina bawahan masih kurang
 - Pemahaman substansi baik materil dan formil masih belum maksimal
 - Pejabat berwenang masih ragu dalam menindak bawahannya yang diduga melakukan pelanggaran disiplin
 - Hierarki pembinaan belum mampu berjalan selaras dengan komitmen pemangku kebijakan dengan konsep normatif dan yuridis.

Solusi pemecahan masalah yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menghadapi permasalahan yang ditemui Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Agar tidak terjadi keterlambatan Persetujuan Kenaikan Pangkat dan terbitnya SK untuk kenaikan pangkat periode April 2016, BKD sudah mengedarkan surat untuk kenaikan pangkat tersebut keseluruh SKPD dan kecamatan di lingkungan Pemkab. HSU sehingga diusahakan SK Pangkat periode April 2016 dapat terbit sesuai waktunya. Dan diharapkan usul Kenaikan Pangkat masuk lebih awal untuk segera diproses usul Kenaikan Pangkatnya melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIK), sehingga Kanreg. VIII BKN dapat segera memproses terlebih dahulu agar Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat PNS tersebut lebih cepat selesai.
2. Upaya kita dengan melakukan Sosialisasi diharapkan para Pejabat berwenang mengetahui dan paham atas mekanisme yang ada, sehingga diperoleh kebijakan yang substansial dan terstruktur dalam pembinaan PNS.
3. Dengan adanya Komitmen bersama, terbuka dan jujur, ataupun adanya perjanjian antara pembuat kebijakan dengan aparatur pelaksana tentunya unsur-unsur dalam kebijakan Kepegawaian dapat berjalan dengan harmonis dan dinamis, terbebas dari sangkaan maupun pelanggaran disiplin.

Tabel 4. Target dan Realisasi

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Untuk membiayai operasional Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2015 mendapat anggaran sebesar Rp. 8.139.809.500,- dan setelah mengalami revisi melalui APBD Perubahan mengalami kenaikan menjadi Rp. 8.547.078.000,- atau 0,95 %. Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.5.516.479.543,- atau sebesar 64,5 %, dengan rincian sebagai berikut:

TARGET DAN REALISASI

NO	JENIS BELANJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (%)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA UUDP ANGGARAN (Rp)	KET
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	108.215.000	100	46,4	50.223.530	57.991.470	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	162.600.000	100	41,1	66.917.641	95.682.359	
3	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	450.000.000	100	77,5	348.908.900	101.091.100	
4	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	475.890.000	100	77,3	367.848.640	108.841.360	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	9.945.000	100	45,8	4.562.500	5.382.500	
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	25.319.000	100	21,7	5.513.000	19.806.000	
7	Penyediaan alat tulis kantor	60.822.000	100	61	37.156.200	23.665.800	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.920.000	100	41	4.072.000	5.848.000	
99	Penyediaan makanan dan minuman	19.000.000	100	53	10.080.000	8.920.000	
10	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	75.600.000	100	0,47	3.599.000	72.001.000	
11	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	66.050.000	100	52,6	34.734.546	31.315.545	
12	Gaji dan tunjangan	2.778.308.000	100	82,1	2.282.282.436	496.025.564	
13	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.567.000	100	83,6	8.835.000	1.732.000	
14	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	18.771.000	100	82,1	15.423.000	3.348.000	
15	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	500.000	100	0	0	500.000	
16	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	908.400.000	100	27,5	249.864.800	658.535.200	

NO	JENIS BELANJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (%)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA UUDP ANGGARAN (Rp)	KET
17	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	501.456.000	100	98,8	495.697.800	5.758.200	
18	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	1.152.395.000	100	89,7	1.033.874.800	118.520.200	
19	Peningkatan Kualifikasi Kepegawaian	26.700.000	100	63,5	16.955.000	9.745.000	
20	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	302.510.000	100	66,2	200.180.950	102.329.050	
21	Seleksi Penerimaan CPNS	428.050.000	100	0,50	21.788.000	406.262.000	
22	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	113.475.000	100	28	31.650.000	81.825.000	
23	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	349.400.000	100	33,6	117.621.800	231.778.200	
24	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin	215.970.000	100	38,3	82.720.000	133.250.000	
25	Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	81.490.000	100	0	0	81.490.000	
26	Penyelenggaraan Proses Administrasi Kepangkatan Aparatur	160.800.000	100	16,6	26.770.000	134.030.000	
27	Fasilitasi pemeriksaan kesehatan	26.250.000	100	0	0	26.250.000	
28	Pembuatan buku DUK	8.675.000	100	0	0	8.675.000	

Dari pos pendapatan, Anggaran Pendapatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 41.875.000,- sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp. 900.000,- atau (0,2%). Hal ini dapat kita maklumi, mengingat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara bukanlah dinas/instansi/badan yang mempunyai potensi untuk menggali/memperoleh pendapatan, tetapi merupakan badan yang mempunyai tugas pelayanan publik dibidang kepegawaian, dan juga disebabkan karena adanya pembangunan gedung diklat sehingga bangunan yang ada tidak dapat dimanfaatkan sebagai sarana penerimaan daerah.

Dari pos Belanja, dimana Anggaran Belanja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Anggarkan sebesar Rp. 8.547.078.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 5.516.479.543,- atau (64,5%), hal ini dikarenakan Badan Kepegawaian Daerah telah berupaya melakukan efisiensi dalam pengeluaran untuk Belanja Barang, selain itu juga dikarenakan ada beberapa anggaran kegiatan yang tidak sepenuhnya terealisasi karena beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan.

Dari Pos Belanja tersebut secara keseluruhan dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.516.479.543,- dari yang dianggarkan Rp. 8.547.078.000,- (64,5%) dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai direalisasikan sebesar Rp. 2.282.282.436,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 2.778.308.000,- (82,1 %)

2. Belanja Langsung

Belanja Pegawai dapat direalisasikan sebesar Rp.358.025.000,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 675.225.000,- (53 %)

Belanja Barang dan Jasa dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.538.768.467,-dari yang dianggarkan sebesar Rp. 4.657.905.000,- (55,5 %)

Belanja Modal dapat direalisasikan sebesar Rp. 337.403.640,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 435.640.000,- (77,4 %).

Anggaran dan Realisasi Per Program :

No.	Program	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.321.711.000,-	Rp. 894.482.411,-	67,6
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 141.650.000,-	Rp. 38.333.546,-	27
3.	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Rp. 26.250.000,-	-	0
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 29.338.000,-	Rp. 24.258.000,-	82,6
5.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 500.000,-	-	0
6.	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Rp. 2.588.951.000,-	Rp. 1.796.372.400,-	69,3
7.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp. 1.660.370.000,-	Rp. 480.730.750,-	29
J u m l a h		Rp. 5.768.770.000,-	Rp. 3.234.177.107,-	56,06

Sedangkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Rekapitulasi Pelaksanaan Renja SKPD

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2015**

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2013			Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD Sampai dengan Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD tahun 2013	Realisasi Renja SKPD Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11			
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Jasa Surat Menyurat	90%	100%	95%	52%	71%	95%	83%	85%
1	20	20	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lancarnya Pelayanan Surat Menyurat	3500 surat	3500 surat	10%	63%	63%	3500 surat	80%	88%
1	20	20	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya penyediaan Komunikasi, Langganan Listrik dan air	90%	95%	90%	85%	80%	95%	100%	100%
1	20	20	03	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi	100%	100%	90%	80%	80%	100%	100%	100%
1	20	29		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100%	65%	85%	75%	88,23%	80%	85%	90%
1	20	29	01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD	Terpenuhinya Persyaratan CPNSD untuk diangkat menjadi PNSD	300 orang	444 orang	229 orang	228 orang	99%	100%	100%	100%
1	20	29	02	Diklat Struktural bagi PNS Daerah	Terpenuhinya Persyaratan bagi Pejabat Eselon II, III dan IV	59 orang	12	15	12	60%	70%	80%	85%
1	20	29	03	Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Terciptanya Sumberdaya Aparatur yang Profesional	200 orang	220 orang	80	80	100%	100%	110%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2013			Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD Sampai dengan Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD tahun 2013	Realisasi Renja SKPD Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11			
1	20	29	04	Peningkatan Kualifikasi Kepegawaian	Meningkatnya Kualifikasi Kepegawaian	40 orang	25 orang	25 orang	25 orang	100%	100%	25%	100%
1	20	29	05	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur	67 orang	67 orang	20 orang	10 orang	50%	100%	100%	100%
1	20	30		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terisinya Formasi sesuai kebutuhan	100%	80%	75%	70%	93,33%	80%	23%	85%
1	20	30	01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	Terisinya Formasi sesuai kebutuhan	700 orang	700 orang	700 orang	700 orang	100,0%	100%	30,86%	27%
1	20	30	02	Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional	Terisinya Formasi sesuai kebutuhan	700 orang	700 orang	700 orang	700 orang	100%	100%	30,86%	27%
1	20	30	03	Penyempahan PNS	Meningkatnya Disiplin PNSD	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	100%	0%	100%
1	20	30	07	Pemberian Bantuan Tugas Belajardan Ikatan Dinas	Tersedianyan Sumberdaya Aparatur yang siap pakai	15 orang	1 orang	5 orang	1 orang	20%	40%	90%	100%
1	20	30	12	Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Tersedianya kader-kader pimpinan daerah	5 orang	1 orang	3 orang	1 orang	40%	60%	0%	50%
1	20	30	05	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Tersedianya sistem NCSIS secara online dapat melakukan perubahan status kepegawaian dengan cepat dan tepat untuk diakses	100%	98%	65%	80%	80%	100%	100%	100%
1	20	30	02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Terpenuhinya Kebutuhan Pegawai pada SKPD	300 Formasi	44 Formasi	100%	100%	100%	100%	23%	75%
1	20	30	17	Penyelenggaraan Proses Administrasi Kepangkatan Aparatur	Terpenuhinya Penghargaan terhadap PNSD sesuai peraturan	1000 orang	1000 orang	95%	95%	95%	100%	150%	100%
1	20	20	30	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Terbina dan berkembangnya disiplin Aparatur	10 kasus	15 kasus	95%	95%	95%	100%	50%	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2013			Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD Sampai dengan Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD tahun 2013	Realisasi Renja SKPD Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11			
1	20	30		Pembuatan Buku DUK PNS	Tersusunnya data PNS dilingkungan Pemkab. HSU berdasarkan Urutan Kepangkatan	70 Buku	70 Buku	100%	100%	100%	100%	0%	100%
1	20	20		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kenyamanan dan keamanan gedung kantor dan diklat	100 %	100 %	90%	90%	85%	100%	100%	100%
1	20	20	01	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya kenyamanan dan keamanan gedung kantor dan diklat	1 Tahun	1 Tahun	90%	90%	85%	100%	95%	95%
1	20	20	02	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Terpenuhinya kendaraan dinas operasional yang siap pakai guna kelancaran kegiatan kepegawaian	1 Tahun	1 Tahun	90%	90%	85%	100%	95%	95%
1	20	20	04	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS. Fasilitasi pemeriksaan kesehatan bagi PNS yang sakit/tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan	Terpenuhinya Proses Pensiun bagi PNS yang tidak cakap jasmani/ rohani dan tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan pada umumnya	10 PNS	0 PNS	0%	0%	0%	100%	0%	50%
1	20	20	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Dokumen LAKIP, Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan	40 buku	40 buku	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	20	20	26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Terbina dan berkembangnya Aparatur di Kabupaten Hulu Sungai Utara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	20	20	26	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Implementasi Peraturan Perundang-undangan secara komprehensif dan berkesinambungan	10 kali	10 kali	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu :

- Masih kurangnya sarana dan prasarana Aparatur.
- Masih adanya Pejabat Struktural yang belum mengikuti Diklat Struktural.
- Terbatasnya kader pimpinan daerah.
- Kurangnya aparatur yang berpendidikan S1 di Bidang Kepegawaian.
- Masih kurangnya pelatihan dan pendidikan teknis dan fungsional.
- Belum terpenuhinya kebutuhan pegawai di SKPD dilingkungan Pemkab. HSU dan banyaknya PNS yang memasuki pensiun.
- Belum Optimalnya Sistem Aplikasi dalam proses perubahan status kepegawaian secara online ke BKN Pusat.
- Belum tertatanya naskah arsip data pegawai secara optimal.
- Semakin meningkatnya teknologi dan informasi mengharuskan kita lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.
- Menurunnya kinerja PNS di Kab. HSU dengan ditemuinya PNS berkeliaran pada jam kerja.
- Perlunya penyegaran bagi Pejabat Struktural, Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Kesehatan dan Staf, Perlunya mengisi formasi yang lowong karena pensiun untuk formasi jabatan Struktural, Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Kesehatan dan Staf.
- Bagi PNS yang akan naik Pangkat ke golongan III/a belum mengikuti Diklatpim. Tk.IV atau belum berpendidikan S.1 diharuskan mengikuti Ujian Dinas Tk.I dan PNS yang akan naik pangkat ke golongan IV/a belum mengikuti Diklatpim. Tk.III atau belum berpendidikan S.2 diharuskan mengikuti Ujian Dinas Tk.II.
- Bagi PNS yang lulus pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dengan status ijin belajar yang pangkatnya belum sesuai dengan pendidikannya, untuk dapat disesuaikan harus mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- Perlunya tersedia data PNS yang akurat berdasarkan urutan kepangkatan dalam rangka pembinaan dan promosi PNS.
- Perlunya pemberian penghargaan kepada PNS berupa kenaikan pangkat bagi yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 diarahkan untuk melanjutkan sebagaimana tahun 2016. Arah Kebijakan ekonomi daerah tahun 2017 Kabupaten Hulu Sungai Utara mengacu pada arah Kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 – 2017, ditujukan pada terciptanya perekonomian masyarakat yang semakin maju dan berkembang dengan berlandaskan pada potensi daerah khususnya rawa, optimalisasi pemanfaatan potensi rawa ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam misi kedua ini juga diharapkan perkembangan pada sektor sekunder seperti produksi barang dan jasa. Dalam beberapa tahun ini peranan sektor perdagangan dan sektor jasa **nulai** meningkat dalam struktur perekonomian daerah. Hal ini memberikan pengaruh yang positif bagi perekonomian karena terindikasi adanya perubahan struktur kearah perekonomian yang lebih bersifat sekunder. Selain itu perekonomian daerah juga perlu diarahkan pada pengembangan industri kecil, koperasi, pertanian dan kedaulatan pangan, perdagangan, hotel, rumah makan serta sektor strategis lainnya. Secara umum arah kebijakan ekonomi daerah pada tahun 2017 tetap tertuju pada pemanfaatan dan pengelolaan lahan rawa, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, di tahun 2017 kerangka ekonomi daerah tertuju pada meningkatnya produksi barang dan jasa yang bersumber dari ekonomi lokal, meningkatnya penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan lembaga perekonomian lokal serta meningkatnya investasi dan permodalan didaerah.

Sejalan dengan hal tersebut dan juga sesuai dengan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 yang salah satu misinya Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). Dalam misi ini diharapkan terwujud birokrasi yang bersih dan profesional dengan organisasi dan sistem pemerintahan yang semakin berkualitas. Untuk itu juga perlu ditunjang oleh **keberdaan** sumberdaya aparatur yang semakin profesional, sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima disertai penegakkan aturan perundang-undangan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dimasyarakat. Perbaikan pada tata kelola pemerintahan harus selalu dilakukan dengan lebih mensinergikan pada upaya pelibatan unsur masyarakat atau lembaga perwakilan rakyat untuk terlibat secara aktif berkontribusi pada berbagai kebijakan pemerintah daerah, peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur pemerintahan, penataan kelembagaan dan

hubungan kerja antar instansi, meningkatkan kualitas kerja baik pada bidang perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengendalian dan pelaporan, serta meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Terkait dengan masalah tersebut, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara akan melaksanakan pembangunan dibidang manajemen kepegawaian sesuai dengan Prioritas dan Sasaran Bidang Sosial Budaya, yang antara lain sebagai berikut :

Peningkatan Implementasi Good Governance, dengan sasaran :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah
3. Meningkatnya kesadaran hukum dan ketaatan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dan juga sesuai dengan program pembangunan daerah berdasarkan jabaran Visi dan Misi RPJPD 2005 – 2025 Bidang Sosial Budaya yang diantaranya :

1. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan formal, struktural, fungsional dan teknis pengelolaan manajemen pemerintahan dan manajemen pelayanan publik
2. Meningkatkan kemampuan manajerial pemerintahan
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintahan
4. Meningkatkan kesejahteraan **aparatu** pemerintah daerah dan
5. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pemerintah daerah.

Dari penelaahan rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dibutuhkan dana sebesar **Rp.,-**. Sumber pendanaan yang diharapkan untuk membiayai kegiatan tersebut dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

- A. Berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang PNS secara Elektronik (e-PUPNS Tahun 2015). ditegaskan antara lain untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam sistem informasi ASN, setiap instansi pemerintah wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikan kepada BKN. Dan juga sesuai dengan Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor : E, 26-30/V 77-4/99. Tanggal 27 Juli 2015 perihal Implementasi e-PUPNS

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2015 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Sosialisasi dan Pelatihan implementasi aplikasi e-PUPNS bagi Pengelola Kepegawaian masing-masing SKPD.
2. Membuat Surat Edaran kepada seluruh PNS untuk melaksanakan e-PUPNS yang dilaksanakan mulai tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang salah satu misinya mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional menuju penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (Good Governance), dan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin banyaknya tuntutan masyarakat yang menghendaki Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah.

Dengan memperhatikan perkembangan isu strategis lingkungan organisasi, seperti perubahan kebijakan nasional dalam sistem manajemen pegawai negeri sipil, dan arah kebijakan pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, dan dalam rangka eksistensi keberadaan dan mewujudkan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai visi :

“ APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA YANG PROFESIONAL, NETRAL DAN SEJAHTERA MENUJU TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE “

Penjelasan Makna

Aparatur Pemerintah dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (1997:162) diartikan sama dengan Pegawai Negeri, yaitu sebagai “unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat”. Istilah tersebut menurut Waworuntu (1997:27) dapat diartikan sebagai :
“ Mereka yang menyumbangkan tenaga atau jasanya kepada badan atau bentuk usaha pemerintah dinamakan pegawai pemerintah yang lazim disebut Pegawai Negeri.”

Selanjutnya istilah Pegawai Negeri dalam artian normatif di Indonesia, dijumpai dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, dan diperbaharui Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 pada Pasal 1 disebutkan bahwa : “Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas-tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis seiring dengan globalisasi pengaruh dan hubungan antar bangsa memacu kompetensi kualitas sumberdaya manusia diberbagai sektor kerja, tidak terkecuali sektor formal pemerintah yaitu sumberdaya aparatur termasuk Pegawai Negeri Sipil. PNS dituntut kompetensinya untuk mampu menghasilkan prestasi tinggi, menjadi sumberdaya manusia birokrasi yang profesional dalam penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan prima kepada masyarakat. Disamping itu masih terkait dengan pelayanan kepada masyarakat PNS dituntut untuk tidak diskriminatif atau netralitasnya, serta harus mampu menciptakan birokrasi yang bersih dalam rangka terciptanya Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Dengan demikian tuntutan keberadaan PNS yang profesional dan netral, harus dibarengi dengan jaminan bahwa PNS juga harus sejahtera.

Dalam rangka mencapai visi dan misi, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya. Agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Misi Pertama : Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui pendidikan dan latihan (Diklat) Aparatur, dengan tujuan :
Meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur untuk meningkatkan kompetensi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Misi Kedua : Meningkatkan Pembinaan Aparatur dalam rangka peningkatan disiplin, kinerja dan kesejahteraan pegawai untuk mewujudkan PNSD yang berprestasi tinggi, dengan tujuan :
Peningkatan Pembinaan Pegawai untuk meningkatkan akuntabilitas dan kesejahteraan pegawai.

Misi Ketiga : Mewujudkan Penataan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sesuai kompetensinya dan menerapkan pola pengembangan karier secara konsisten sesuai peraturan, dengan tujuan :

Terwujudnya penataan pegawai sesuai kompetensi jabatan dan syarat jabatan serta menerapkan pola pengembangan karier secara konsisten.

Misi Keempat : Pengembangan jaringan SAPK yang berbasis NCSIS secara online, dengan tujuan :

Dapat melakukan perubahan status kepegawaian dengan cepat dan tepat untuk diakses oleh seluruh PNS.

Misi Kelima : Meningkatkan pelayanan prima administrasi kepegawaian dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi yang tepat didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat, dengan tujuan :

Meningkatnya Kinerja Pelayanan kepegawaian dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah daerah guna mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

Masing-masing tujuan tersebut diuraikan kembali kedalam sasaran-sasaran yang akan dicapai, dirincikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Aparatur untuk meningkatkan kompetensi sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan sasaran Meningkatkan SDM Aparatur melalui Pendidikan dan Latihan. Indikator sasaran ini adalah Peningkatan jumlah PNSD berdasarkan tingkat pendidikan formal, Diklat, Bimtek dan Sosialisasi.
2. Peningkatan Pembinaan Pegawai untuk meningkatkan akuntabilitas dan kesejahteraan pegawai dengan sasaran Meningkatnya disiplin Pegawai, dengan Indikator sebagai berikut :
 - a) Jumlah Penjatuhan Hukuman disiplin ;
 - b) Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi ;
 - c) Jumlah SKPD yang menyampaikan tembusan laporan penindakan pelanggaran disiplin tingkat ringan dan sedang ;
 - d) Jumlah SKPD yang menyampaikan rekapitulasi daftar hadir PNS

3. Terwujudnya penataan pegawai sesuai kompetensi jabatan dan syarat jabatan serta **serta** menerapkan pola pengembangan karier secara konsisten dengan sasaran Tertatanya PNS berdasarkan kompetensi dan syarat jabatan, Indikatornya adalah :
 - a. Persentasi jumlah jabatan struktural yang terisi ;
 - b. Terpenuhinya persyaratan pendidikan formal dalam jabatan, persyaratan pangkat dan persyaratan kompetensi pendidikan penjurangan ;
 - c. Terisinya jabatan fungsional yang harus ada pada setiap SKPD ;
 - d. Persentasi pejabat fungsional yang telah sesuai dengan pendidikan formal.

4. Dapat melakukan perubahan status kepegawaian dengan cepat dan tepat untuk diakses oleh seluruh PNS dengan sasaran Terwujudnya Pengembangan jaringan SAPK yang berbasis NCSIS secara online, Indikatornya adalah :
 - a. Persentasi Pengembangan Jaringan SAPK ;
 - b. Jumlah Data PNS Kab. HSU yang dapat diakses ;

5. Peningkatan Kinerja Pelayanan kepegawaian dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah daerah guna mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya sarana dan prasarana kerja dengan Indikator Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan.
 - b. Meningkatnya akuntabilitas organisasi dengan Indikator Keberadaan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA, LPPD, LKPJ, LAKIP) dan laporan keuangan yang disampaikan (Laporan Bulanan, Semesteran, CALK dan laporan tahunan).

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka program dan kegiatan utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016, yaitu :

- 1). Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
 - d. Peningkatan Kualifikasi Kepegawaian

- 2). Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur :
 - a. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran disiplin PNS.
 - b. Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
 - c. Pembuatan Buku DUK
 - d. Seleksi Penerimaan Calon PNS
 - e. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS
 - f. Proses Administrasi Kepangkatan Aparatur
 - g. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
 - h. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
 - i. Proses Administrasi Usul mendapatkan Kartu TASPEN, KARPEG dan KARIS/KARSU
 - j. Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi PNS yang memiliki masa kerja 10 th, 20 th, dan 30 th

- 3). Program Fasilitasi Purna Tugas PNS :
 - a. Fasilitasi pemeriksaan kesehatan bagi PNS yang sakit/tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan.
 - b. Proses Administrasi Pensiun.

- 4). Program Penataan Peraturan Perundang-undangan :
 - a. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan program dan kegiatan pendukung dalam rangka Pencapaian Program Kegiatan Utama di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 yaitu :

- 1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan listrik
 - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Bangunan Kantor
 - f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - g. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - h. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - i. Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi keluar Daerah.

- 2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
 - a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
 - b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- 3). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan.

Tabel 7. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2017

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
	1.1. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	BKD	Jumlah PNS yang mengikuti/lulus Diklat Struktural	20 Orang	
	1.2. Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah	BKD	Jumlah CPNS yang Lulus Diklat Prajabatan	5 Orang	
	1.3. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	BKD	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan fungsi	120 Orang	
	1.4. Peningkatan Kualifikasi Kepegawaian	BKD	Jumlah PNS yang lulus Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	40 Orang	
2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				
	2.1. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS di lingkungan Pemkab. HSU	BKD	Jumlah Penjatuhan Hukuman Disiplin	15 kasus	
	2.2. Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	BKD	Jumlah Data PNS Kab. HSU yang dapat di akses	5083 PNS	
	2.3. Pembuatan Buku DUK	BKD	Jumlah Buku Data DUK PNS Kab. HSU	70 Buku	
	2.4. Seleksi Penerimaan Calon PNS	BKD	Terisinya formasi Pegawai dan Jabatan sesuai dengan kompetensi aparatur	514 Formasi	
	2.5. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS/Tertatanya PNS berdasarkan kompetensi dan syarat jabatan	BKD	Jumlah formasi pegawai dan jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi Aparatur	700 Orang	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
2.6	Proses Administrasi Kepangkatan Aparatur	BKD	Jumlah PNSD yang naik pangkat	2 Periode (1000 Orang)	
2.7	Pemberian Bantuan Penyelenggaran Penerimaan Praja IPDN	BKD	Jumlah alumni SMA/MA menjadi Capra IPDN	5 Orang	
2.8	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	BKD	Jumlah PNS yang tugas belajar / Praja yang mengikuti Pendidikan	7 Orang	
2.9	Proses Administrasi Usul mendapatkan Kartu TASPEN, KARPEG dan KARIS/KARSU	BKD	Jumlah Kartu TASPEN, KARPEG dan KARIS/KARSU yang diterbitkan.	514 lbr	
2.10	Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi PNS yang memiliki masa kerja 10 th, 20 th, dan 30 th.	BKD	Jumlah PNS yang mendapatkan Penghargaan	200 orang	
3.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKD	Terkelolanya administrasi jasa surat menyurat	3500 Surat	
3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKD	Persentasi Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	
3.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	BKD	Jumlah Alat Kebersihan Kantor yang tersedia	25 paket	
3.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BKD	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	45 paket	
3.5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor	BKD	Jumlah Komponen Instalasi listrik dan alat listrik lainnya yang tersedia	17 paket	
3.6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	66 unit	
3.7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	BKD	Jumlah Peralatan Kerja yang siap pakai	97 buah	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
3.8	Penyediaan Makan dan Minum	BKD	Terpenuhinya Penyediaan Makan dan Minum Rapat Karyawan/ti BKD	1450 kotak	
3.9	Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi Keluar Daerah	BKD	Persentasi Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	100 % (200 kali)	
4.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
4.1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	BKD	Jumlah Bangunan/Gedung yang terpeliharanya	3 (tiga) Bangunan Gedung	
4.2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BKD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang siap pakai untuk kelancaran pelaksanaan tugas	2 unit Mobil 18 unit Kendaraan roda 2	
5.	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS				
5.1	Fasilitasi pemeriksaan kesehatan bagi PNS yang sakit / tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan	BKD	Jumlah PNS yang tidak cakap jasmani/rohani yang terfasilitasi pemeriksaan kesehatan untuk proses pensiun.	3 PNS	
5.2	Proses Administrasi Pensiun	BKD	Jumlah Surat Keputusan Pensiun yang terbit	200 lbr SK Pensiun	
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKD	Keberadaan Dokumen LAKIP / Kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	10 buku	
6.2	Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan	BKD	Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, LKPJ dan LPPD	10 buku	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
7.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 7.1 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi guna Terlaksananya Implementasi Peraturan Perundang-undangan secara komprehensif dan berkesinambungan	200 Orang	

BAB IV. PENUTUP

Dalam pembiayaan pembangunan bidang Kepegawaian, peran anggaran pemerintah di samping sebagai stimulus, anggaran yang dialokasikan juga merupakan instrumen pengendalian, memberikan informasi rinci atas pelaksanaan operasional program maupun kegiatan.

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan pembangunan di bidang Kepegawaian dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan dari aspek keuangan dapat memenuhi kaidah pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Pemilihan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 merupakan Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan semakin banyaknya tuntutan masyarakat yang menghendaki Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah.

Amuntai, Pebruari 2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

H. MUHAMMAD TAUFIK, S.Sos,MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620522 198503 1 005

LAMPIRAN

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)								Catatan Penting	Prakiraan Maju Th. 2018	
					Lokasi	Target capaian kinerja	Total Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana						Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
								APBD Kab			APBD Prov	APBN			
								APBD Murni	DAK						
			Fisik	Pendamping											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Nama SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH															
1	20 08 29			1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	20 08 29 02		1. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNSD Daerah	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur	BKD	20 orang	897,140,000	APBD				24 orang	1,050,000,000
1	20 08 29 01		2. Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur	BKD	5 orang	20,000,000	APBD				60 orang	510,000,000
1	20 08 29 03		3. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur	BKD	120 orang	700,000,000	APBD				120 orang	750,000,000
1	20 08 29 07		4. Peningkatan Kualifikasi Kepegawaian	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Meningkatnya Kualifikasi Kepegawaian	BKD	40 orang	25,400,000	APBD				40 orang	30,000,000
1	20 08 30			2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur											
1	20 08 30 09		5. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS di lingkungan Pemkab. HSU	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya kesadaran hukum dan ketaatan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Terbinanya PNS yang indisipliner dan timbulnya efek jera bagi PNS yang melanggar disiplin sehingga tidak akan mengulangi kesalahannya lagi	BKD	15 Kasus	150,800,000	APBD				13 Kasus	200,000,000
1	20 08 30 05		6. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Jumlah data PNS Kab. HSU yang dapat diakses	BKD	5083 PNS	186,060,000	APBD				5200 PNS	200,000,000
1	20 08 30 19		7. Pembuatan Buku Duk	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya data PNS sesuai DUK	BKD	70 Buku	8,675,000	APBD				70 Buku	9,750,000
1	20 08 30 02		8. Seleksi Penerimaan Calon PNS	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terisinya formasi pegawai dan jabatan sesuai dengan kompetensi Aparatur	BKD	514 Formasi	508,510,000	APBD				525 Formasi	520,000,000
1	20 08 30 01		9. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terisinya formasi pegawai dan jabatan sesuai dengan kompetensinya	BKD	725 orang	350,000,000	APBD				725 orang	430,250,000
1	20 08 30 17		10. Proses Administrasi Kepangkatan Aparatur	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terselenggaranya proses Administrasi Kepangkatan Aparatur sesuai ketentuan yang berlaku	BKD	1000 orang	135,297,500	APBD				1000 orang	182,000,000
1	20 08 30 12		11. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terisinya formasi pegawai dan jabatan sesuai dengan kompetensi Aparatur	BKD	5 orang	95,000,000	APBD				5 orang	97,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)								Prakiraan Maju Th. 2018			
					Lokasi	Target capaian kinerja	Total Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana				Catatan Penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		
								APBD Kab		APBD Prov	APBN					
								APBD Murni	DAK							
		Fisik		Pendamping												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	20 08 02 22	24. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Jumlah Bangunan / Gedung yang terpelihara	BKD	3 Bangunan	50,000,000	APBD						3 Bangunan	104,750,000
1	20 08 02 24	25. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang siap pakai untuk kelancaran pelaksanaan tugas	BKD	2 unit mobil 18 unit kendaraan roda 2	50,850,000	APBD						2 unit mobil 18 unit kendaraan roda 2	75,400,000
1	20 08 04	5. Program Fasilitas Purna Tugas PNS														
1	20 08 04 04	26. Fasilitasi pemeriksaan kesehatan bagi PNS yang sakit/tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur	BKD	3 PNS	16,014,000	APBD						6 PNS	20,000,000
		27. Proses Administrasi Pensiun	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur	BKD	200 lbr SK Pensiun	20,400,000	APBD						220 lbr SK Pensiun	34,500,000
1	20 08 06	6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan														
1	20 08 06 01	28. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	BKD	10 buku	15,250,000	APBD						10 buku	16,500,000
1	20 08 06 04	29. Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	BKD	10 buku	21,750,000	APBD						10 buku	23,500,000
1	20 08 26	7. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan														
1	20 08 26 04	30. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya kesadaran hukum dan ketaatan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Terlaksananya Implementasi Peraturan Perundang-undangan secara komprehensif dan berkesinambungan	BKD	200 orang	58,150,000	APBD						300 orang	90,000,000
JUMLAH ANGGARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH								4,699,336,500								6,008,456,350

Amuntai, Februari 2016
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

H. MUHAMMAD TAUFIK,S.Sos,MM
NIP. 19620522 198503 1 005